

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah singkat keistimewaan Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY. Oleh Jepang ini disebut dengan Koti/Kooti.

Di Jakarta pada 19 Agustus 1945 terjadi pembicaraan serius dalam sidang PPKI membahas kedudukan Kooti. Dalam sidang itu Pangeran Puruboyo, wakil dari Yogyakarta Kooti, meminta pada pemerintah pusat supaya Kooti dijadikan 100% otonom. Kemudian kedudukan Kooti ditetapkan status quo sampai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pada hari itu juga Soekarno mengeluarkan piagam penetapan kedudukan bagi kedua penguasa tahta Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Piagam tersebut baru diserahkan pada 6 September 1945 setelah sikap resmi dari para penguasa monarki dikeluarkan.

Pada tanggal 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan Yogyakarta Kooti Hookookai. Setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi, barulah Sultan HB IX

mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945 . Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yang sama.

Wilayah DIY (D.I. Kasultanan dan D.I Paku Alaman) beserta Kab/Kota dalam lingkungannya pada 1945 adalah pada saat berintegrasi wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta meliputi:

Kabupaten Kota Yogyakarta dengan bupatinya KRT Hardjodiningrat,

Kabupaten Sleman dengan bupatinya KRT Pringgodingrat,

Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT Joyodiningrat,

Kabupaten Gunung Kidul dengan bupatinya KRT Suryodiningrat,

Kabupaten Kulon Progo dengan bupatinya KRT Secodiningrat.

Sedang wilayah kekuasaan Kadipten Paku Alaman meliputi:

Kabupaten Kota Paku Alaman dengan bupatinya KRT Brotodiningrat,

Kabupaten Adikarto dengan bupatinya KRT Suryaningprang.

Kabupaten-kabupaten tersebut tidak memiliki otonomi melainkan hanya wilayah administratif. Bupati-bupati yang mengepalai masing-masing kabupatennya disebut dengan Bupati Pamong Praja. Mereka juga mengepalai birokrasi kerajaan yang disebut dengan Abdi Dalem Keprajan. Birokrasi kerajaan inilah yang akan menjadi tulang punggung utama Kabupaten dan Kota di DIY sampai tahun 1950.

Untuk merumuskan susunan dan kedudukan daerah Yogyakarta, BP KNID juga menyelenggarakan sidang maraton untuk merumuskan RUU Pokok Pemerintahan Yogyakarta sampai awal 1946. RUU ini tidak kunjung selesai karena perbedaan yang tajam antara BP KNID, yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah biasa seperti daerah lain, dengan kedua penguasa monarki, yang menghendaki Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Akhirnya RUU yang terdiri dari 10 Bab tersebut dapat diselesaikan.

Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII dengan persetujuan BP DPR DIY (Dewan Daerah) pada 18 Mei 1946 mengeluarkan Maklumat No. 18 yang mengatur kekuasaan legeslatif dan eksekutif. Maklumat ini adalah realisasi dari keputusan sidang KNI Daerah Yogyakarta pada 24 April 1946. Setelah menyetujui rencana maklumat itu, KNID membubarkan diri dan digantikan oleh Dewan Daerah yang dibentuk berdasarkan rencana maklumat. Dalam sidangnya yang pertama DPR DIY mengesahkan rencana maklumat No 18 yang sebelumnya telah disetujui dalam sidang KNI Daerah Yogyakarta tersebut. Dalam maklumat ini secara resmi nama Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan menandai bersatunya dua monarki Kesultanan dan Pakualaman dalam sebuah Daerah Istimewa.

Setelah pengakuan kedaulatan sebagai hasil KMB, Indonesia memasuki babakan sejarah yang baru. Negara Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta sejak 1946, hanyalah sebuah negara bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berkedudukan di Jakarta sampai 17 Agustus 1950. Secara formal dibentuk dengan UU No. 3 Tahun 1950 yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 1950. Kedua UU tersebut diberlakukan mulai 15 Agustus 1950 dengan PP No. 31 Tahun 1950. UU 3/1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah singkat (hanya 7 pasal dan sebuah

lampiran daftar kewenangan otonomi). UU tersebut hanya mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah anggota DPRD, macam kewenangan, serta aturan-aturan yang sifatnya adalah peralihan. UU 19/1950 sendiri adalah perubahan dari UU 3/1950 yang berisi penambahan kewenangan bagi DIY. Status keistimewaan Yogyakarta tidak diatur lagi dalam UU pembentukan karena telah diatur dalam UU 22/1948. Dalam UU 3/1950 disebutkan secara tegas Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Propinsi bukan sebuah Propinsi. Walaupun nomenklaturnya mirip, namun saat itu mengandung konsekuensi hukum dan politik yang amat berbeda terutama dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Walau begitu DIY bukan pula sebuah monarki konstitusional. Kemudian pada tahun 1951 Yogyakarta menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif di Daerah Istimewa dan Kabupaten.

Perubahan yang cukup penting, pasca UU 3/1950 adalah perubahan wilayah. Wilayah birokrasi eksekutif yang menjadi DIY adalah wilayah Negara Gung yang dibagi 3 kabupaten yakni Kota, Kulonprogo dan Kori dan kemudian menjadi 4 kabupaten 1 kota seperti yang sekarang.

Pengaturan keistimewaan DIY dan pemerintahannya selanjutnya diatur dengan UU No 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 131-133 UUDS 1950. Pengaturan Daerah Istimewa terdapat baik dalam diktum maupun penjelasannya.

Substansi istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam kontrak politik antara Nagari Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Puro Pakualaman

dengan Pemimpin Besar Revolusi Soekarno. Subtansi Istimewa bagi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tiga hal :⁴⁰

Istimewa dalam hal Sejarah Pembentukan Pemerintahan Daerah Istimewa sebagaimana diatur UUD 45, pasal 18 & Penjelasannya mengenai hak asal-usul suatu daerah dalam teritorir Negara Indonesia serta bukti - bukti autentik/fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini dalam memajukan Pendidikan Nasional & Kebudayaan Indonesia;

Istimewa dalam hal Bentuk Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari penggabungan dua wilayah Kasultanan & Pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (sebagaimana disebutkan dalam Amanat 30 Oktober 1945, 5 Oktober 1945 & UU No.3/1950);

Istimewa dalam hal Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan & Adipati yang bertahta (sebagaimana amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang menyatakan Sultan & Adipati yang bertahta tetap dalam kedudukannya dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang Sultan & Adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya.

Sedangkan subtansi keistimewaan yang tertuang dalam Undang-undang keistimewaan Yogyakarta yaitu meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah daerah DIY,

⁴⁰<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/815/sejarah-keistimewaan-yogyakarta>

kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.⁴¹Subtansi keistimewaan tersebut dalam Undang-undang keistimewaan terwujud sebagai bentuk kewenangan dalam urusan keistimewaan yang meliputi :⁴²

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

Undang-undang No 13 2012 mengatur bahwa kasultanan dan kadipaten adalah badan hukum yang merupakan subyek hak yang memiliki hak milik atas tanah kasultanan dan kadipaten serta berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.⁴³

Selanjutnya UU No 13 2012 juga mensyaratkan pembentukan ketentuan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten serta tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten diatur dalam Perdais, yang penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.⁴⁴

⁴¹<http://www.tribunnews.com/nasional/2012/08/30/ini-keistimewaan-keistimewaan-diy-dalam-undang-undang>

⁴² UU No 13 2012 pasal 7

⁴³ UU No 13 2012 pasal 32

⁴⁴ UU No 13 2012 pasal 35

Kemudian ketentuan tentang pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten yang dimaksudkan di atas dituangkan dalam bentuk peraturan daerah istimewa tentang pertanahan.

B. Kabupaten Sleman

I. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $107^{\circ} 15' 03''$ dan $107^{\circ} 29' 30''$ BujurTimur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten KulonProgo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.⁴⁵

Pusat pemerintahan di Kecamatan Sleman, berada di jalur utama antara Yogyakarta-Semarang. Dengan Pendapatan Asli Daerah Rp. 52.978.731.000- (2005) Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten Terkaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagian utara kabupaten ini merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Merapi di perbatasan dengan JawaTengah, salah satu gunung berapi aktif yang paling berbahaya di Pulau Jawa. Sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur. Di antara sungai-sungai besar yang melintasi kabupaten ini adalah Kali Progo (membatasi kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo), Kali Code, dan Kali Tapus.

⁴⁵ Letak dan luas wilayah, <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>

II. LUAS WILAYAH

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara-Selatan 32 Km, Timur-Barat 35 Km. Secara administrative terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86Desa, dan 1.212 Dusun.⁴⁶

Table II.I

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jml Penduduk (jiwa)	Kepadatan (Km ²)
		Desa	Dusun			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1.216
2	Godean	7	57	2.684	57.245	2.133
3	Minggir	5	68	2.727	34.562	1.267
4	Gamping	5	59	2.925	65.789	2.249
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151	1.583
6	Sleman	5	83	3.132	55.549	1.774
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1.712
8	Mlati	5	74	2.852	67.037	2.351
9	Tempel	8	98	3.249	46.386	1.428
10	Turi	4	54	4.309	32.544	755
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1.064
12	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1.524
13	Berbah	4	58	2.299	40.226	1.750
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1.243
15	Pakem	5	61	4.384	30.713	701
16	Depok	3	58	3.555	109.092	3.069
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	549
	Jumlah	86	1.212	57.482	850.176	1.479

Sumber : <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>

⁴⁶ Letak dan luas wilayah, <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>

III. KARAKTERISTIK ALAM KABUPATEN SLEMAN

Berdasarkan karakteristik sumberdaya, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi empat kawasan, yaitu.⁴⁷

- a. Kawasan Lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan Kota Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan (*rightbelt*) sampai dengan Puncak Gunung Merapi. Wilayah ini kaya sumberdaya air dan potensi ekowisata yang beorientasi pada aktivitas gunung Merapi dan ekosistemnya.
- b. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, Kalasan, Berbah. Wilayah ini kaya merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) sebagai pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.
- c. Kawasan Tengah yaitu wilayah aglomerasi Perkotaan Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok, dan Gamping. Wilayah ini cepat berkembang, merupakan pusat pendidikan, industri, perdagangan, dan jasa.
- d. Kawasan Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan, merupakan daerah pertanian lahan basah dan penghasil bahan baku kegiatan industri kerajinan mending, mambu, dan gerabah.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta dan dapat dibedakan menjadi :

⁴⁷ Karakteristik Kabupaten Sleman, dari <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupatensleman/geografi/karakteristik-wilayah>

1. Wilayah agromenasi perkotaan Yogyakarta, yang meliputi Kecamatan Depok, Gamping, serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik, Ngemplak, Kalasan Berbah, Sleman, dan Mlati.
2. Wilayah sub-urban, meliputi kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik, yang terletak cukup jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
3. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan, yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

IV. TOPOGRAFI

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya di bagian selatan relative datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relative miring dan di bagian utara sekitar Lereng Merapi relative terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng).

1. KETINGGIAN

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara <100 sd >1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu ketinggian <100m, 100–499 m, 500–999 m dan >1000 m dari permukaan laut.

Ketinggian <100 m dari permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 % dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian >100–499 m dari permukaan laut seluas 43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian >500–999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha atau 11,38 % dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tepel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian >1000 m dari permukaan laut seluas 1.495 ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.

2. KEMIRINGAN LAHAN (LERENG)

Dari Peta topografi skala 1:50.000 dapat dilihat ketinggian dan jarak horizontal untuk menghitung kemiringan (Lereng). Hasil analisa peta yang berupa data kemiringan lahan digolongkan menjadi 4 (empat) kelas yaitu lereng 0–2 %; >2–15 %; >15–40 %; dan >40 %. Kemiringan 0–2 % terdapat di 15 (limabelas) Kecamatan meliputi luas 34.128 ha atau 59,32 % dari seluruh wilayah lereng, >2–15 % terdapat di 13 (tiga belas) Kecamatan dengan luas lereng 18.192 atau 31,65 % dari luas total wilayah. Kemiringan lahan >15–40 % terdapat di 12 (duabelas) Kecamatan luas lereng ini sebesar 3.546 ha atau 6,17 %, lereng >40 % terdapat di Kecamatan Godean, Gamping, Berbah, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan dengan luas 1.616 ha atau 2,81 %.

3. IKLIM

Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan November–April dan musim kemarau antara bulan Mei–Oktober. Pada tahun 2000 banyaknya hari hujan 25 hari terjadi pada bulan maret, namun demikian rata-

rata banyaknya curah hujan terdapat pada bulan februari sebesar 16,2 mm dengan banyak hari hujan 20 hari.

Adapun kelembaban nisbi udara pada tahun 2000 terendah pada bulan agustus sebesar 74 % dan tertinggi pada bulan maret dan November masing-masing sebesar 87 %, sedangkan suhu udara terendah sebesar 26,1 derajat celcius pada bulan januari dan November dan suhu udara yang tertinggi 27,4 derajat celcius pada bulan September.

4. TATA GUNA

Tanah Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Keadaan jenis tanahnya dibedakan atas sawah, tegal, pekarangan, hutan, dan lain-lain. Perkembangan penggunaan tanah selama 5 tahun terakhir menunjukkan jenis tanah Sawah turun rata-rata pertahun sebesar 0,96 %, Tegalan naik 0,82 %, Pekarangan naik 0,31 %, dan lain-lain turun 1,57 %.

Tabel II.2

Tata Guna Tanah di Kabupaten Sleman

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)								
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1.	Sawah	24.662	24.586	24.381	24.321	24.291	23.483			
2.	Tegalan	6.184	6.214	6.255	6.256	5.864	6.407			
3.	Pekarangan	18.461	18.488	18.609	18.659	18.688	18.759			
4.	Lain-lain*	8.175	8.194	8.237	8.246	8.639	8.833			
	Jumlah	57.482	57.482	57.482	57.482	57.482	57.482			

Sumber : Sub.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

* terdiri dari hutan rakyat, hutan negara, kolam/empang/tebat, tanah kuburan, jalan, dan lapangan.

V. RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH YOGYAKARTA

Berdasarkan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Yogyakarta, arah pengembangan wilayah Yogyakarta secara garis besar ditetapkan sebagai berikut:

a. Kodya Yogyakarta

Diarahkan untuk berfungsi secara mantap sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, perusahaan, kerajinan, pendidikan, dan pengembangan pariwisata.

b. Kabupaten Sleman

Diarahkan sebagai daerah pertanian tanaman pangan, tanaman perdagangan dan hortikultura serta pengembangan pendidikan, industry dan pariwisata.

c. Kabupaten Bantul

Diarahkan sebagai daerah pertanian, perdagangan dan pariwisata.

d. Kabupaten Gunung Kidul

Diarahkan sebagai daerah pertanian, pengembangan, tenaga kerja, tanaman perdagangan, pariwisata, peternakan dan kerajinan.

e. Kabupaten Kulon Progo

Diarahkan sebagai daerah pertanian, perdagangan dan hortikultura, pertambangan, pariwisata dan industri.

VI. Jumlah dan Karakteristik Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.125.369 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 559.302 jiwa (49,70%), perempuan 566.067 jiwa (50,30%) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,73% dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 305.376 Penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar berada pada rentang usia produktif 15-60 tahun. Struktur penduduk Kabupaten Sleman terlihat dalam tabel berikut:

Tabel II.3

Struktur Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2014

No	Struktur Usia (tahun)	Jumlah Laki- laki	Jumlah Perempuan	Total
1	0-4	32.088	30.285	62.373
2	5-9	38.799	36.371	75.170
3	10-14	40.252	37.453	77.705

4	15-19	37.461	35.289	72.750
5	20-24	37.095	36.334	73.429
6	25-29	49.703	50.034	99.737
7	30-34	55.938	54.872	110.810
8	35-39	51.435	51.699	103.134
9	40-44	48.386	48.432	96.818
10	45-49	39.475	40.390	79.865
11	50-54	32.822	34.389	67.211
12	55-59	26.945	26.944	53.889

13	60-64	17.862	19.636	37.498
14	65-69	16.253	18.349	34.602
15	70-74	13.219	16.037	29.256
16	75 Keatas	21.569	29.553	51.122
	Total	559.302	566.067	1.125.369

Sumber : Data BPS Tahun 2014

Tabel II.4

Jumlah Penduduk Kabupaten Kab. Sleman Menurut Kecamatan Th. 2014

No	Kecamatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Gamping	75.252	47.530	94.873
2	Kecamatan Godean	37.362	37.890	75.252
3	Kecamatan Moyudan	18.394	19.396	37.790
4	Kecamatan Minggir	18.925	19.986	38.911
5	Kecamatan	26.489	27.383	53.872

	Seyegan			
6	Kecamatan Mlati	48.732	49.136	97.868
7	Kecamatan Depok	65.787	64.872	130.659
8	Kecamatan Berbah	25.528	25.768	51.296
9	Kecamatan Prambanan	32.959	30.344	63.303
1 0	Kecamatan Kalasan	36.253	36.752	73.005
1 1	Kecamatan Ngemplak	99.511	31.476	61.925

1 2	Kecamatan Ngaglik	49.468	50.043	99.511
1 3	Kecamatan Sleman	34.182	35.072	69.254
1 4	Kecamatan Tempel	32.580	33.564	66.144
1 5	Kecamatan Turi	19.761	20.422	40.183
1 6	Kecamatan Pakem	18.857	19.504	38.361
1 7	Kecamatan Cangkring an	16.233	16.929	33.162

	Jumlah	559.30	566.067	1.125.36
		2		9

Sumber : Data BPS Tahun 2014

Pada tahun 2014 sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman terbesar bergerak di sektor pertanian yakni sebanyak 28,6% dan sektor jasa sebanyak 24,39%.

C. Kecamatan Prambanan

I. Georaafis

Kecamatan Prambanan berada di sebelah Timur Laut dari Ibukota Kabupaten Sleman. Jarak Ibukota Kecamatan kePusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Sleman adalah 25 Km. Lokasi ibukota kecamatan Prambanan berada di 7.75655^o LS dan 110.49.012^o BT. Kecamatan Prambanan mempunyai luas wilayah 4.136,9605 Ha. Kecamatan Prambanan berbatasan dengan, Utara: Kecamatan Kalasan, Timur: Kecamatan Prambanan Klaten, Selatan: Kecamatan Piyungan, Barat: Kecamatan Berbah.

Sedang alamat Kantor Kecamatan Prambanan di Jl. Solo Km 13 Prambanan, Sleman. Desa di Wilayah administrasi Kecamatan Prambanan:

1. Desa Bokoharo
2. Desa Gayamharjo
3. Desa Madurejo

4. Desa Sambirejo

5. Desa Sumberharjo

6. Desa Wukirharjo

Kecamatan Prambanan berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 149 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Prambanan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Prambanan adalah 33° C dengan suhu terendah 22° C. Bentangan wilayah di Kecamatan Prambanan berupa tanah yang datar, berombak dan sebagian berupa perbukitan.

II. Penduduk

Kecamatan Prambanan dihuni oleh 16.597 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Prambanan adalah 45.244 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 21.723 orang dan penduduk perempuan 23.521 orang dengan kepadatan penduduk mencapai 1.063 jiwa/km². Sebagian besar penduduk Kecamatan Prambanan adalah Petani. Dari data monografi Kecamatan tercatat 12.960 orang atau 28.65 % penduduk Kecamatan Prambanan bekerja di sektor pertanian.

III. Pertanian

Produksi pertanian yang paling banyak di kecamatan ini adalah padi yang mencapai 13.088,44 ton pertahun, kemudian disusul ketela pohon, jagung dan kacang.

IV. Perikanan dan Peternakan

Yang terbanyak adalah ternak kambing yaitu 4.792 ekor, kemudian sapi dan kerbau. Unggas yang terbanyak ayam buras ada sekitar 93.795 ekor, diikuti ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Hasil produksi perikanan kecamatan ini mencapai 20.759 kg/tahun, yang terbanyak adalah ikan lele sebesar 6.675 kg, disusul gurameh dan mujair.